

KEPARAHAN KEMISKINAN MASYARAKAT PERDESAAN: Perbandingan Antara Masyarakat Nelayan dan Petani

Mochamad Ridwan¹⁾, Waldi Novi Yarsah²⁾

¹⁾Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu

²⁾Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sriwijaya

mridwan@unib.ac.id, waldinoviarsah@fe.unsri.ac.id

ABSTRACT

It is alleged that the severity of poverty between fishing communities and farming communities is different. Therefore, the aim of this research is to compare the factors that differentiate the severity of poverty between fishing communities and farming communities in rural areas. This research took the case of fishing communities from Air Napal Sub District, Bengkulu Utara District, and farming communities from Pondok Kelapa Sub District, Bengkulu Tengah District. Data was collected through interviews, observation, group discussions, and documentation methods. Sampling was carried out using purposive sampling. Data analysis was carried out using quantitative methods and qualitative-descriptive methods. The results of the research show that the level (index) of poverty severity in fishing communities is higher (more severe) than in farming communities. Other findings show that the differences in the severity of poverty between these two communities are quite high due to differences in the quality of capital systems, differences in the quality of efforts (facilities and infrastructure), differences in the quality of product marketing network systems, differences in the quality of related cooperative institutions, differences in the quality of social capital, differences in the quality of roles. relevant government agencies, and differences in weather quality and/or pests.

Keywords: Severity Of Poverty¹, Fishing Communities², Farming Communities³

ABSTRAK

Diduga tingkat keparahan kemiskinan antara masyarakat nelayan dan masyarakat petani berbeda. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan faktor-faktor yang membedakan tingkat keparahan kemiskinan antara masyarakat nelayan dan masyarakat petani di daerah pedesaan. Penelitian ini mengambil kasus komunitas nelayan dari Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dan komunitas petani dari Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok, dan metode dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat (indeks) keparahan kemiskinan di masyarakat nelayan lebih tinggi (lebih parah) dibandingkan di masyarakat petani. Temuan lain menunjukkan bahwa perbedaan tingkat keparahan kemiskinan antara kedua komunitas ini cukup tinggi karena perbedaan kualitas sistem permodalan, perbedaan kualitas usaha (sarana dan prasarana), perbedaan kualitas sistem jaringan pemasaran produk, perbedaan kualitas lembaga koperasi terkait, perbedaan kualitas modal sosial, perbedaan kualitas peran. instansi pemerintah terkait, dan perbedaan kualitas cuaca dan/atau hama.

Kata kunci: Tingkat Keparahhan Kemiskinan¹, Komunitas Nelayan², Komunitas Tani³

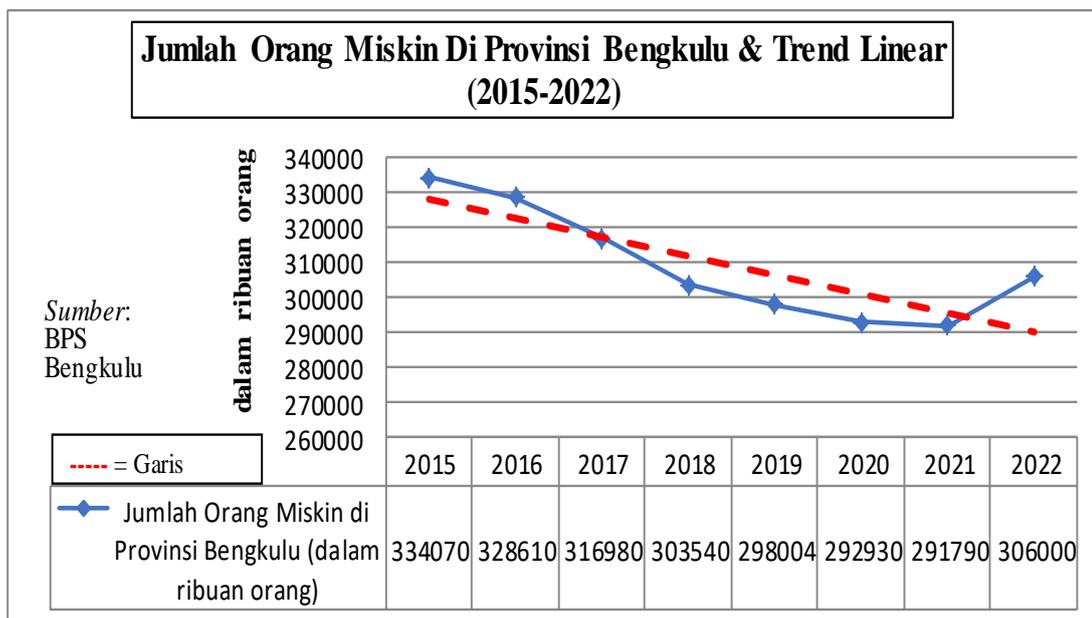
PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik Bengkulu (2023) menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Provinsi Bengkulu, sebagian besar berada di wilayah pedesaan dan di dalamnya jumlah

masyarakat pesisir lebih besar dari pada masyarakat petani. Di Indonesia, nelayan kecil merupakan kelompok yang paling dominan dan merupakan kelompok paling miskin dibanding kelompok yang lain (Kusdiantoro et al., 2019). Secara empirik, fenomena ini dapat diamati dari kegiatan kesehariannya yang hanya mengandalkan hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hampir sebagian besar nelayan tangkap dalam kategori miskin mengandalkan kehidupan dan penghidupannya pada sumberdaya alam kelautan, tanpa memiliki sumber penghidupan lain. Provinsi Bengkulu, kendati potensi sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkapnya masih dalam kategori *underfishing* atau potensinya masih cukup besar untuk dilakukan eksploitasi secara optimal dan berkelanjutan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan masih jauh dari yang diharapkan (Monang dan Bangun, 2018).

Permasalahan kemiskinan yang terjadi pada kehidupan masyarakat nelayan perdesaan tidak hanya disebabkan oleh tekanan-tekanan yang bersumber dari lingkungan eksternal seperti faktor badai atau fluktuasi musim ikan yang tidak menentu, namun juga berasal dari lingkungan internal nelayan itu sendiri seperti keterbatasan sumberdaya modal, keterbatasan akses, dan lain-lain. Dampak lebih lanjut yang sangat dirasakan oleh masyarakat nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan mereka karena semakin sulitnya mendapatkan ikan hasil tangkapan yang sesuai dengan harapan. Sebuah studi menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan pada umumnya terkait dengan permasalahan tingkat keparahan kemiskinan. Fenomena keparahan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan, pada umumnya mengarah pada bentuk permasalahan yang bersifat krusial dan tidak mudah untuk diatasi (Irwan, 2017); (Ahmaddien & Ahmaddien, 2019); (Anwar, 2019).

Secara empirik, kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di semua kluster masyarakat baik masyarakat pesisir maupun masyarakat petani di perdesaan dan perkotaan. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah orang miskin khususnya di Provinsi Bengkulu, sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 (2015-2022) cenderung mengalami penurunan atau terjadi *Trend* yang menurun secara gradual (lihat Gambar 1). Khususnya di daerah perdesaan, angka kemiskinan mengalami penurunan walaupun tidak setajam yang terjadi di daerah perkotaan.



Gambar 1. Kecenderungan (Trend) dari Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Bengkulu (2015-2022)

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya pada komunitas petani (subsektor pertanian sawah), secara umum ditandai oleh beberapa karakteristik internal seperti rendahnya kualitas pendidikan formal yang dimiliki, masih rendahnya teknologi yang digunakan, dan pengelolaan usaha tani yang belum profesional. Kendala-kendala internal tersebut berimplikasi terhadap rendahnya produktivitas hasil dari subsektor pertanian sawah. Tekanan kemiskinan terhadap masyarakat petani sawah ini, cenderung berasal dari lingkungan eksternal seperti masih rendahnya peran lembaga koperasi terkait dalam meningkatkan produktivitas petani, termasuk di dalamnya peranan dari pengadaan sarana dan prasarana pertanian serta sistem pemasaran hasil produksi pertanian. Fakta lain yang perlu dipertimbangkan adalah masyarakat petani sebenarnya memiliki sumberdaya alam pertanian yang bisa dikontrol (beberapa permasalahan masih bisa dikendalikan) dan hasil produksi masih bisa diprediksi dengan baik (Liu et al., 2020); (Suryahadi et al., 2020).

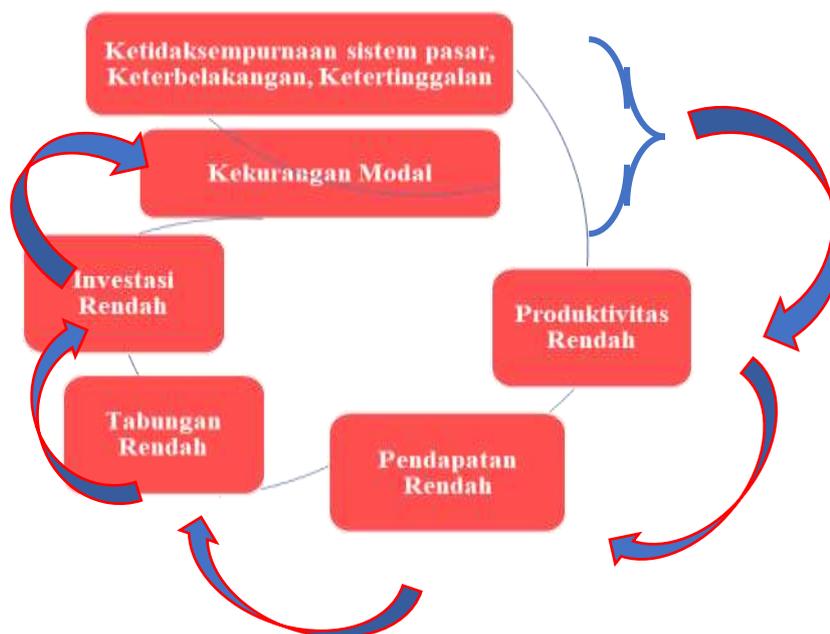
TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang terjadi akibat sebab-sebab yang bersifat melingkar. Ragnar Nurkse, dalam teori Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty) menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan dimulai dari adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi ini

meyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat, yang menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan menyebabkan tabungan dan berakibat pada semakin rendahnya kemampuan investasi. Kesemuanya berakhir pada semakin rendah akumulasi permodalan dan semakin memperparah tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat (Nawaz et al., 2022); (Setyawati et al., 2021); (Pang et al., 2022). Teori lingkaran setan kemiskinan ini secara jelas ditampakkan pada Gambar 2.

Kemiskinan yang terjadi khususnya pada masyarakat pesisir (nelayan) erat kaitannya dengan keberadaan sumberdaya alam kelautan yang ada di sekitarnya. Sebagai faktor *endowment*, sumberdaya alam kelautan yang dikelola secara optimal dan memperhatikan aspek konservasi, seharusnya dapat menopang kehidupan perekonomian masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan yang mata pencaharian pokoknya hanya bergantung pada hasil tangkapan ikan dari laut. Namun realitas menunjukkan bahwa masyarakat nelayan senantiasa berhadapan dengan faktor ketidakpastian dan risiko yang tinggi. Hal ini tentu akan membawa dampak terhadap kehidupan dan penghidupan komunitas nelayan dari waktu ke waktu, apalagi jika diperparah dengan sikap yang depletif dalam cara pengelolaannya (Wijaya & Fauzie, 2020).

Menurut Gordon Schifer, sumberdaya alam kelautan akan mengalami tangkap lebih secara ekonomi (*economic overfishing*) jika pengelolaannya tidak diatur dan tidak dikendalikan secara baik oleh pemerintah (*uncontrollable*) (seperti yang telah diisyaratkan oleh teori “tragedy of the commons” dari Garrett Hardin). Fenomena ini terjadi karena sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap tidak seperti sumberdaya alam yang lain (misalnya sumberdaya alam pertanian yang sifat kepemilikannya cukup jelas). Sumberdaya alam kelautan merupakan sumberdaya alam milik umum (*common natural resources*) atau mempunyai sifat akses terbuka (*open access*), artinya semua individu dalam masyarakat dapat mengakses atau mengeksploitasi sumberdaya alam kelautan tanpa ada batasan, sehingga sering muncul eksek yang tidak diinginkan seperti terjadinya pencemaran di lautan yang akan mengganggu stabilitas dari sumberdaya alam kelautan. Karakteristik sumberdaya alam seperti ini menyebabkan nelayan harus selalu bergerak dalam mendapatkan hasil tangkapan ikan yang maksimal (Prasetyo, 2019); (Rakhmanda et al., 2018); (Vince & Hardesty, 2018).



Gambar 2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

Khususnya fenomena kemiskinan yang terjadi dalam suatu masyarakat petani (termasuk di dalamnya masyarakat petani sawah), secara teoritik selalu berkaitan dengan permasalahan kemiskinan krusial seperti masalah keterbelakangan, ketidaksempurnaan sistem pasar, kekurangan modal, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan rendahnya peran kelembagaan ekonomi terkait. Faktor-faktor tersebut membawa pengaruh terhadap rendahnya kinerja dan produktivitas masyarakat petani. Implikasi yang dapat terjadi adalah semakin rendah pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat akan berdampak terhadap ketidakmampuan dalam meningkatkan tabungan dan dalam bisnis akan menurunkan investasi. Pengaruh berikutnya adalah akan memperlemah kemampuan dalam meningkatkan modal. Dampak yang terjadi akibat dari semakin rendahnya permodalan adalah semakin memperburuk kondisi kemiskinan masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin terpuruk akibat pengaruh negatif yang bersifat melingkar ini, seandainya tidak segera ditemukan solusinya, maka akan memperparah kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kemiskinan tampaknya memerlukan analisis yang bersifat struktural dan dapat diarahkan untuk memutus lingkaran kemiskinan tersebut (dikaitkan dengan teori Lingkaran Setan Kemiskinan dari Ragnar Nurkse, 1953) (Wang et al., 2020); (Hallegatte et al., 2020).

Salah satu bentuk lembaga ekonomi di wilayah perdesaan yang mempunyai peranan cukup penting dan strategis dalam mereduksi dan menekan keparahan kemiskinan baik bagi masyarakat pesisir (nelayan) masyarakat petani adalah lembaga koperasi. Pada kasus masyarakat nelayan dan petani, peran lembaga koperasi dinilai sangat penting dan strategis. Hal ini karena berkaitan peran koperasi baik dalam penguatan sistem bantuan permodalan maupun sistem jaringan pemasaran hasil. Kusmiati et al., (2018) menjelaskan bahwa dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi melalui pengoptimalan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan memberi penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi yang ada di masyarakat (termasuk di dalamnya lembaga ekonomi koperasi yang ada di perdesaan) merupakan sebuah pemikiran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Guna mendukung program pemberdayaan tersebut, sangat dibutuhkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengorganisasian di antara masyarakat dengan pelaku lembaga koperasi (Baehaqi Syamsu, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan deduktif. Jenis data yang dikumpulkan bersumber pada data primer (sebagai data utama) dan data sekunder (sebagai data penunjang). Data primer untuk kasus masyarakat nelayan pedesaan, berasal dari Kecamatan Air Napal (Kabupaten Bengkulu Utara), sedangkan kasus masyarakat petani pedesaan berasal dari Kecamatan Pondok Kelapa (Kabupaten Bengkulu Tengah). Sumber data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu dan dari Dinas-dinas terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan atau Dinas Pertanian) yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Semua data primer dikumpulkan dengan metode wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan pengamatan. Metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk tujuan memperoleh tanggapan dari para pemberi informasi kunci (*key informants*) terhadap masalah keparahan kemiskinan baik dari wilayah Kecamatan Air Napal (Kabupaten Bengkulu Utara) maupun masyarakat petani pedesaan dari wilayah Kecamatan Pondok Kelapa (Kabupaten Bengkulu Tengah). Metode pengamatan digunakan untuk tujuan mengamati secara seksama kondisi objek penelitian di lapangan.

Data sekunder dari berbagai sumber (BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian) dikumpulkan dengan metode dokumentasi (melakukan serangkaian pencatatan semua data yang telah dipublikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian).

Adapun jumlah sampel dari populasi masyarakat nelayan yang terpilih sebagai responden adalah sebanyak 43 nelayan (populasi nelayan berjumlah 498 nelayan) (yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap) di Kecamatan Air Napal (Kabupaten Bengkulu Utara), sedangkan jumlah sampel dari populasi masyarakat petani yang terpilih sebagai responden adalah sebanyak 50 petani (populasi petani sawah berjumlah 400 petani) (yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan lahan pertanian sawah) di Kecamatan Pondok Kelapa (Kabupaten Bengkulu Tengah). Sampel yang berperan sebagai pemberi informasi kunci (*key informant*) diambil dari para tokoh masyarakat nelayan atau masyarakat petani, dan instansi-instansi terkait seperti dinas kelautan dan perikanan atau Dinas Pertanian. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan/secara sengaja (*purposive sampling method*).

Semua data primer yang diperoleh dihitung dengan menggunakan formulasi yang tersedia .

1. Keparahan kemiskinan masyarakat nelayan dan masyarakat petani, dihitung dengan formula: (BPS, 2022)

$$P\alpha = \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^\alpha, \text{ di mana:}$$

- $\alpha = 2$, sehingga $P_2 =$ Indeks keparahan kemiskinan masyarakat nelayan atau masyarakat petani;
- $z =$ angka garis kemiskinan;
- $y_i =$ rata-rata pengeluaran perkapita sebulan masyarakat nelayan atau masyarakat petani yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$;
- $n =$ jumlah masyarakat nelayan atau masyarakat petani; dan
- $q =$ banyaknya masyarakat nelayan atau masyarakat petani yang berada di bawah garis kemiskinan.

2. Hasil perhitungan indeks keparahan kemiskinan baik dari masyarakat nelayan maupun masyarakat petani, selanjutnya dianalisis dengan *metode analisis deskriptif-kualitatif*, yakni melakukan analisis/elaborasi secara kualitatif dan mendeskripsikan hasil wawancara, pengamatan, dan diskusi kelompok terfokus secara lugas, mendalam, objektif, dan kritis; yang kesemuanya berbasis pada data primer dan data sekunder yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Perhitungan (Analisis Kuantitatif) Indeks Keparahannya Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Perdesaan

Berbasis pada data sekunder dan data primer yang telah dikumpulkan, melalui metode dokumentasi dan metode wawancara akhirnya dapat diidentifikasi indeks keparahan kemiskinan masyarakat nelayan di perdesaan Kecamatan Air Napal (Kabupaten Bengkulu Utara) sebagai berikut:

Formulasi Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2):
$$P_2 = \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

Berdasarkan data yang diperoleh ($z = \text{Rp. } 369.367,-$ perkapita/bulan; $y_i = \text{Rp. } 165.000,-$ perkapita/bulan; $n = 498$ nelayan; dan $q = 281$ nelayan), maka:

$$P_2 = 1/498 \times [(369.367 - 165.000)/369.367]^2 = 0,002 \times [(0,306 \times 281) - (0,306 \times 1)]$$

$$P_2 = 0,002 \times (85,932 - 0,306) = 0,002 \times 85,626 = 0,171.$$

Angka indeks ini mengindikasikan penyebaran/ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara masyarakat nelayan miskin dengan garis kemiskinannya ($\text{Rp. } 369.367,-$ perkapita/bulan) adalah *cukup besar* (keparahan kemiskinan masyarakat nelayan *cukup parah*).

Hasil Perhitungan (Analisis Kuantitatif) Indeks Keparahannya Kemiskinan Masyarakat Petani di Perdesaan

Berbasis pada data sekunder dan data primer yang telah dikumpulkan, melalui metode dokumentasi dan metode wawancara, akhirnya dapat ditemukan angka indeks keparahan kemiskinan masyarakat petani (petani sawah) di perdesaan Kecamatan Pondok Kelapa (Kabupaten Bengkulu Tengah) sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Indeks Keparahan Kemiskinan } (P_2): P_2 = \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^2$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *angka indeks keparahan kemiskinan* masyarakat petani sawah (P_2 -Petani) Desa Sri Kuncoro adalah **0,004**. Angka indeks ini diperoleh dengan memasukkan beberapa besaran yaitu: n (jumlah masyarakat petani sawah di Desa Sri Kuncoro) = 400 petani, q (banyaknya masyarakat petani sawah yang berada di bawah garis kemiskinan di Kecamatan Pondok Kelapa) = 50 petani, y_i (rata-rata pengeluaran perkapita sebulan masyarakat petani sawah yang berada di bawah garis kemiskinan di Kecamatan Pondok Kelapa) = 300.000, and z (garis kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah) = 369,367 perkapita perbulan ke formula indeks keparahan kemiskinan. Angka P_2 (*Indeks Keparahan Kemiskinan Masyarakat Petani*) = **0.004**, menunjukkan angka yang **relatif rendah/sangat kecil**. Relatif rendahnya angka indeks keparahan kemiskinan masyarakat petani sawah Desa Sri Kuncoro ini mengindikasikan tingkat ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara komunitas petani dengan garis kemiskinannya relatif tidak parah.

Pembahasan

Analisis Deskriptif-Kualitatif (Ekonomi dan Sosial) Keparahan Kemiskinan Masyarakat Nelayan dan Faktor Penyebab Terjadinya

Analisis hasil perhitungan dan temuan penelitian (berdasarkan hasil wawancara mendalam dan diskusi bersama dengan 8 tokoh masyarakat nelayan), terungkap 7 faktor (ekonomi dan sosial) yang dianggap sebagai penyebab *cukup tingginya* angka indeks keparahan kemiskinan pada masyarakat nelayan. Secara rinci dapat diuraikan melalui bahasan/analisis deskriptif-kualitatif sebagai berikut:

1. Upaya (Effort) dalam bentuk Sarana dan Prasarana (Infrastruktur). Lemahnya/terbatasnya upaya (*effort*) dalam bentuk sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan tradisional menyebabkan tingginya angka indeks keparahan kemiskinan dalam masyarakat nelayan. Ketergantungan nelayan yang sangat tinggi terhadap aset sarana seperti kualitas armada/kapal/perahu dan sarana tangkap (jaring atau pancing), berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan nelayan pada jarak dan waktu yang ditempuh dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut dan rendahnya produktivitas hasil tangkapan ikan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan (kondisi masyarakat

nelayan yang miskin ini diakibatkan oleh sarana yang digunakan dalam proses penangkapan relatif sederhana). Prasarana (infrastruktur) seperti tempat pelelangan ikan (TPI) yang tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan mekanisme pemasaran ikan laut hasil tangkapan menjadi tidak berjalan efektif. Salahsatu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil dari tekanan-tekanan nelayan besar khususnya dalam permasalahan upaya (*effort*) dalam wujud sarana dan prasarana (Hikmah & Nasution, 2018).

2. Sistem permodalan. Bagi masyarakat nelayan, permodalan menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting dan urgen bagi pengembangan kinerja dan produktivitas usaha nelayan. Hasil wawancara dan diskusi bersama kelompok nelayan tradisional memberi indikasi bahwa masyarakat nelayan sangat membutuhkan permodalan dalam bentuk sarana (kapal/perahu dan alat tangkap). Hal ini disebabkan sarana penangkap ikan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kesehariannya untuk melakukan aktivitas menangkap ikan di laut. Masyarakat nelayan tidak hanya urgen akan kebutuhan sarana tangkap saja, tetapi juga kebutuhan akan modal kerja (dana yang dibutuhkan pada saat melakukan aktivitas nelayan) seperti modal untuk BBM (bahan bakar minyak), makan, dan minum. Masyarakat nelayan juga dihadapkan pada sistem permodalan yang bersifat “mengikat”, di mana para pemberi modal (yang secara umum dilakukan oleh para toke ikan/pemasar ikan, nelayan kelas besar, atau pemberi permodalan), dalam memberikan pinjaman permodalan kepada nelayan terutama nelayan tradisional/nelayan kecil “selalu” disertai dengan “syarat tertentu sebagai bentuk ikatan”, seperti keharusan menjual hasil tangkapan ikan kepadanya (tidak diperbolehkan ke tempat/pemasar lain) (Ridwan & In’am, 2021). Dikuatkan oleh hasil penelitian Kornitasari et al. (2019), yang memperlihatkan sistem permodalan yang berlaku pada masyarakat nelayan di Kabupaten Malang Selatan, yaitu dengan menggunakan model “Principal Agent”. Model ini system permodalan yang dapat diakses oleh nelayan melalui 3 sumber yaitu perbankan, modal sendiri, dan dari pemodal (*pengambek*-istilah masyarakat nelayan di Kabupaten Malang Selatan, Provinsi Jawa Timur).

3. Sistem Pemasaran/Saluran Pemasaran (*marketing-chain*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pemasaran untuk hasil penangkapan ikan laut oleh masyarakat nelayan menghadapi permasalahan yang serius. Masyarakat nelayan kecil

tidak mampu menyalurkan hasil tangkapan perikanan lautnya seperti yang diharapkan. Terjadinya hambatan saluran pemasaran ini disebabkan oleh dua faktor yaitu: 1) tidak adanya prasarana (infrastruktur) tempat pelelangan ikan (TPI) yang berfungsi sebagai tempat pemasaran seperti model “pelelangan” yang sesungguhnya. Pemasaran hanya dilakukan secara parsial (satu saluran pemasaran) yaitu saluran yang hanya dilakukan antara nelayan dengan para “toke ikan” (cenderung tidak transparan), sehingga senantiasa terjadi penentuan/keputusan harga yang “tidak adil” (tingkat harga yang jauh lebih rendah dari tingkat harga pasar yang sesungguhnya/*real-price*). 2) adanya ikatan yang tidak nampak (*invisible-binding*) antara nelayan (sebagai penghasil perikanan laut) dengan para “toke” (sebagai penyalur pemasaran/penerima/pembeli hasil tangkapan ikan dari nelayan), menyebabkan munculnya keengganan dan bahkan rasa takut dari pihak nelayan untuk menjual/memasarkan hasil tangkapan ikannya ke pemasar ikan lain (yang mampu memberikan harga yang jauh lebih tinggi). Diungkap oleh Susilawati, (2019) bahwa secara umum ada 3 saluran pemasaran hasil tangkapan ikan laut yang secara umum terjadi pada masyarakat nelayan, yaitu melalui TPI (dilakukan dengan sistem pelelangan), dipasarkan ke pengepul ikan, dan langsung dipasarkan ke pengecer. Ketiga cara pemasaran ini membawa dampak yang berbeda satu sama lain, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan nelayan (terutama nelayan kecil).

4. Peranan lembaga koperasi terkait. Peranan yang kecil dari lembaga koperasi yang terkait dengan jenis matapencaharian masyarakat sebagai nelayan (kondisi empiris menunjukkan tidak adanya koperasi perikanan laut di sekitar masyarakat nelayan). Padahal secara normatif dan empiris, posisi lembaga koperasi ini sangat penting dan sangat strategis dalam mengangkat keterpurukan kemiskinan masyarakat nelayan, terutama dalam mengangkat keparahannya. Pernyataan/kesimpulan ini diambil dari hasil diskusi bersama dengan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Air Napal (Kabupaten Bengkulu Utara). Lembaga koperasi perikanan laut di wilayah perdesaan sangat dibutuhkan khususnya untuk memutus mata rantai sistem permodalan yang ada dalam lingkungan masyarakat nelayan yang cenderung merugikan (lebih mengarah ke bentuk *patron-client*) (Aida et al., 2020); (Arifandy et al., 2020).

5. Modal Sosial (*Social Capital*) dalam bentuk sikap kerjasama (*cooperation*). Masyarakat nelayan mempunyai sikap kerjasama dengan pihak eksternal (kelompok di

luar masyarakat nelayan) yang relatif rendah. Hasil wawancara dan diskusi bersama dengan para tokoh masyarakat nelayan, terungkap bahwa salahsatu bentuk lemahnya/rendahnya kerjasama adalah rendahnya partisipasi masyarakat nelayan terhadap keberadaan prasarana/infrastruktur tersedia seperti keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai wujud dari sikap kerjasama (salah satu aspek modal sosial). Penyebab keengganan masyarakat nelayan memanfaatkan fasilitas TPI adalah rendahnya kesadaran masyarakat nelayan akan manfaat/pentingnya bentuk “pasar pelelangan” dalam proses penentuan harga pasar yang lebih menguntungkan dan bersifat terbuka dari pada dilakukan secara sendiri-sendiri dengan para tengkulak ikan (toke ikan) (Darwis & Zulkarnain, 2020).

6. Peran Lembaga Pemerintah Terkait. Secara normatif, lembaga-lembaga pemerintah terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan seharusnya mampu berperan dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, pembimbingan, mediasi, dan literasi; agar kinerja nelayan meningkat secara bersama-sama atau paling tidak beriringan. Hasil diskusi bersama dengan para tokoh nelayan, memberikan gambaran realitas yang kontradiktif, yakni belum dirasakannya peranan pemerintah (Dinas Kelautan & Perikanan) yang sesungguhnya khususnya berkaitan dengan aspek bantuan permodalan dan pemasaran hasil tangkapan ikan laut.

7. Kondisi cuaca (badai) yang dihadapi. Secara sosial, keseluruhan masyarakat nelayan senantiasa dihadapkan dengan kondisi cuaca (badai). Kondisi ketergantungan nelayan yang kuat terhadap cuaca (badai) ini disebabkan oleh konsekuensi profesi nelayan yang berhadapan secara langsung dengan kondisi cuaca (badai) tersebut. Semakin kuat badai (cuaca jelek), akan mempertinggi resiko terhadap aktivitas nelayan di laut. Faktor cuaca jelek (badai) inilah yang menyebabkan nelayan (terutama nelayan tradisional) berhenti melaut dengan waktu yang tidak bisa dipastikan. Kondisi yang “*idle*” ini mengakibatkan nelayan dalam waktu tertentu tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali dan kondisi keterpurukan ini tidak mampu digantikan oleh kegiatan/pekerjaan lain (pekerjaan sampingan) yang diharapkan berfungsi sebagai “katup pengaman” dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga nelayan. Kondisi keterpurukan inilah, nelayan terutama nelayan tradisional terjebak dalam keparahan kemiskinan yang cukup tinggi.

Analisis Diskriptif-Kualitatif (Ekonomi dan Sosial) Keperahan Kemiskinan Masyarakat Petani dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya

Hasil wawancara dan diskusi kelompok yang terdiri dari 9 tokoh masyarakat petani (termasuk di dalamnya kepala desa Sri Kucoro), ditemukan 7 faktor (ekonomi dan sosial) yang disinyalir sebagai penyebab indeks keperahan kemiskinan masyarakat petani sawah relatif rendah, yaitu:

1. Upaya (*Effort*) dalam bentuk Sarana dan Prasarana (Infrastruktur).

Permasalahan infrastruktur merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat petani sawah, di mana infrastruktur berupa bendungan sumberdaya alam air merupakan kebutuhan pokok dalam meningkatkan produktivitas pertanian sawahnya. Kebutuhan sistem pengairan yang hanya mengandalkan sumberdaya alam air secara parsial (memanfaatkan drainase atau saluran air dalam debit yang tidak memadai), hal ini akan menyulitkan dalam meningkatkan produktivitas pertanian sawahnya secara optimal. Infrastruktur sumberdaya alam air dalam bentuk bendungan ini sangat membutuhkan sebuah lembaga pengelola yang profesional seperti lembaga koperasi. Kebutuhan sistem irigasi yang tepat sangat identik dengan kebutuhan akan teknologi dalam meningkatkan efisiensi atau produktivitas produksi sumberdaya alam pertanian sawah.

2. Sistem Permodalan. Masyarakat petani sawah dihadapkan pada berbagai kendala dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kinerja (produktivitas) petani padi. Salah satu kendala utamanya adalah terkait dengan sistem permodalan (kemampuan petani dalam mengakses permodalan). Salah satu peran penting dari lembaga koperasi adalah mampu menyediakan permodalan bagi masyarakat petani dan sarana pupuk bersubsidi (harga yang relatif lebih rendah dari pada harga pupuk tidak bersubsidi) (Masripah & Yuliansyah, 2018). Dikuatkan oleh hasil diskusi bersama dengan para tokoh petani sawah, bahwa saat ini lembaga koperasi di desa sampel sudah tidak aktif atau tidak berfungsi. Sisi lain, permodalan masih sangat dibutuhkan terutama permodalan untuk keperluan di saat musim tanam dan panen. Di saat musim tanam, masyarakat petani sawah sangat membutuhkan permodalan/pendanaan untuk biaya pengolahan/pembajakan lahan sawahnya, biaya pemupukan, dan biaya perumputan; sedangkan pendapatan bersih dari hasil panen rata-rata hanya sebesar 11-12 juta rupiah persatu hektar sawah untuk setiap kali panen (jumlah pendapatan sebesar ini tidak termasuk sebagian hasil panen padi yang

sudah dicadangkan untuk keluarga sampai musim panen berikutnya). Kekurangan modal ini semestinya bisa dibantu oleh lembaga koperasi perdesaan yang di sekitarnya, di mana peranan koperasi sangat strategis dalam pengendalian permasalahan permodalan ini.

3. Sistem pemasaran (*marketing system*). Permasalahan sistem pemasaran hasil pertanian, secara kuat ditampakkan oleh permasalahan saluran pemasaran (*marketing-chains*) hasil pertanian sawah. Dalam konteks ini, hasil panen sawah (padi) dari Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa (Kabupaten Bengkulu Tengah) hanya dapat dipasarkan melalui tengkulak (*toke*) dan umumnya dihargai dengan patokan harga yang lebih rendah dari harga normal yang terjadi di pasar. Hal ini disebabkan karena para petani sawah (yang berperan sebagai penjual produk padi) jumlahnya relatif cukup banyak, sedangkan para tengkulak yang cenderung berperan sebagai pembeli tunggal, sehingga menjadikan model pasarnya cenderung berbentuk pasar persaingan “monopsoni” (dengan pembeli produk padi yang bersifat tunggal dan cenderung berperilaku monopolis) (Arbi et al., 2018); (Saleh, 2020).

4. Peranan lembaga koperasi terkait. Keberadaan lembaga koperasi yang terkait dengan jenis matapecaharian masyarakat sangat penting dan sangat strategis posisinya dalam mengangkat keterpurukan kemiskinan masyarakat (petani sawah) dilihat dari aspek keparahannya. Pernyataan ini diambil dari kesimpulan hasil diskusi bersama masyarakat petani sawah yang ada di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa (Kabupaten Bengkulu Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga koperasi pertanian sangat dibutuhkan karena mempunyai peranan sangat penting sebagai lembaga dalam membantu (memberi pinjaman) tambahan permodalan, lembaga pemasar hasil panen sawah (padi), penyangga harga agar tidak jatuh, dan penyedia sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit, dan lain-lain. Dikuatkan oleh hasil studi Juliman (2018) bahwa rendahnya peranan lembaga koperasi berdampak terhadap munculnya permasalahan seperti: (1) Jalur pemasaran (*marketing-chain*) hasil panen yang senantiasa bergantung pada para “tengkulak”, sehingga harga padi tidak mampu terangkat secara maksimal (lembaga koperasi tidak mampu dalam pengaturan sistem saluran pemasaran yang menguntungkan bagi masyarakat petani sawah); dan (2) Penyediaan bibit benih padi berkualitas rendah dan umumnya didatangkan dari luar negeri, yang biasanya rentan terhadap serangan hama.

5. **Modal sosial (*social capital*) dalam bentuk kerjasama.** Hasil wawancara/diskusi bersama dengan para tokoh petani sawah (para ketua kelompok petani sawah dan kepala desa) sebanyak 9 orang, mengindikasikan bahwa modal sosial dalam bentuk ikatan kerjasama (ikatan kebersamaan) antar anggota dan antar kelompok dalam masyarakat petani sawah masih cukup kuat. Tingginya aspek modal sosial dalam bentuk ikatan kerjasama (ikatan kebersamaan) yang terbangun dalam masyarakat petani sawah ini yang menyebabkan sistem permodalan banyak dibentuk secara kekeluargaan dengan berpegang pada kebersamaan. Penguatan sistem permodalan ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap penguatan usaha khususnya dari masyarakat pertanian sawah, yang pada gilirannya akan mampu mereduksi keparahan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat pertanian sawah (Kharisma et al., 2020); (Lulun et al., 2019).

6. **Peran Lembaga Pemerintah Terkait.** Secara normatif, lembaga-lembaga pemerintah terkait seperti Dinas Pertanian seharusnya mampu berperan dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, pembimbingan, mediasi, dan literasi; agar kinerja petani meningkat secara signifikan. Hasil diskusi bersama dengan para tokoh petani khususnya petani sawah (padi), memberikan gambaran realitas yang belum optimal, artinya relatif belum dirasakannya peranan pemerintah (Dinas Pertanian) yang sesungguhnya khususnya berkaitan dengan aspek penyediaan pupuk, bantuan permodalan, pemasaran hasil pertanian, dan lain-lain.

7. **Kondisi cuaca dan hama yang dihadapi.** Secara empiris, keseluruhan masyarakat petani kerap dihadapkan pada kondisi cuaca dan hama. Berhadapan dengan kondisi ini, masyarakat petani menanggapi tidak begitu bermasalah. Hal ini karena masyarakat petani merasa tidak begitu tergantung terhadap kondisi cuaca dan hama. Sebagai contoh, ketika terjadi cuaca ekstrim/jelek (misalnya terjadi hujan lebat) atau adanya serangan hama, biasanya tidak berpengaruh kuat terhadap kinerja petani dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Kondisi yang tidak begitu ekstrim inilah masyarakat petani dimungkinkan masih bisa bertahan hidup seperti biasanya atau tingkat keparahan kemiskinannya masih relatif rendah.

KESIMPULAN

Perbandingan tingkat keparahan kemiskinan yang diukur melalui indeks keparahan kemiskinan antara masyarakat nelayan dan masyarakat petani di perdesaan (P_2 -Nelayan Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara adalah 0,171 dan P_2 -Petani Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 0,004) menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan masyarakat nelayan *lebih tinggi* (lebih parah) dari masyarakat petani. Cukup tingginya angka perbedaan tingkat keparahan kemiskinan antara masyarakat nelayan dan masyarakat petani di perdesaan (Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah) adalah karena perbedaan kualitas upaya (sarana dan prasarana) atau infrastruktur, perbedaan kualitas sistem permodalan, perbedaan kualitas sistem jaringan pemasaran hasil, dan perbedaan kualitas peran lembaga koperasi terkait, perbedaan kualitas modal sosial, perbedaan kualitas peranan lembaga pemerintah terkait, dan perbedaan kualitas cuaca dan/atau hama.

Selanjutnya, didasarkan pada hasil kajian empiris, kajian teoritik, dan review hasil penelitian sebelumnya; akhirnya dapat dikemukakan sebuah temuan penting dan sekaligus sebagai sebuah kebaruan penelitian (*novelty*) bahwa “Keparahan kemiskinan masyarakat nelayan ternyata jauh lebih tinggi dari pada masyarakat petani sawah, di mana secara anomalistik semestinya masyarakat nelayan yang dikelilingi oleh anugerah (*endowment*) sumberdaya alam kelautan yang masih sangat berlimpah (*underfishing*)”.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Adapun yang menjadi keterbatasan yang dihadapi oleh penelitian ini yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini (kemiskinan masyarakat nelayan dan masyarakat petani) sebagian besar (sebagai data utama) berupa data primer (data kualitatif) dan hanya sebagian kecil berupa data sekunder (data kuantitatif) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu; dan 2) Data sekunder (data *time series*) yang digunakan hanya terbatas 8 tahun (2015 – 2022), dengan alasan data diambil untuk melihat dampak sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 (sebelum tahun 2019 dan sesudah tahun 2020).

Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya, data sekunder yang digunakan seyogyanya lebih diperluas lagi, kendati tetap menggunakan data primer sebagai data utama (berfungsi

memperkuat dan mempertajam kemampuan penggunaan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif); dan 2) Data panel (penggabungan antara data *time series* dan data *cross-section*) menjadi salah satu solusi keterbatasan tahun data yang digunakan, sehingga metode analisis kuantitatif bisa diperluas/diperdalam dengan metode analisis-metode analisis yang lain seperti analisis kausalitas (analisis regresi linear berganda, analisis independensi SEM-Pls, dan lain-lain).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, I., & Ahmaddien, I. (2019). Faktor determinan keparahan dan kedalaman kemiskinan Jawa Barat dengan regresi data panel. *FORUM EKONOMI*, 21(1).
- Aida, K. N., Agustang, A., Arlin, A., & Agustang, A. D. M. (2020). The patron-client relationship patterns in Siwa Lima fishermen community, Aru Islands district Maluku, Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*.
- Anwar, Z. W. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. *Sosioreligius*, 1(4).
- Arbi, M., Thirtawati, T., & Junaidi, Y. (2018). ANALISIS SALURAN DAN TINGKAT EFISIENSI PEMASARAN BERAS SEMI ORGANIK DI KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 11(1). <https://doi.org/10.19184/jsep.v11i1.7151>
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN: PERSPEKTIF MODAL KERJA. *Jurnal Akademi Akuntansi*. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Baehaqi Syamsu, N. (2023). Peran Koperasi Sebagai Lembaga Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(6). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.788>
- Darwis, & Zulkarnain. (2020). The Effect of Social Capital Assets to the Success of Fisherman's Household Moving out of Poverty. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/430/1/012023>
- Hallegatte, S., Vogt-Schilb, A., Rozenberg, J., Bangalore, M., & Beaudet, C. (2020). From Poverty to Disaster and Back: a Review of the Literature. *Economics of Disasters and Climate Change*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s41885-020-00060-5>
- Hikmah, H., & Nasution, Z. (2018). UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 7(2). <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>
- Irwan, M. (2017). Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penanganannya Dalam Ekonomi Islam. *Journal of Economics and Business*.
- Juliman, J. (2018). PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOPERASI DI KABUPATEN MUSI RAWAS. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*,

2(2). <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v2i2.61>

- Kharisma, B., Remi, S. S., Wardhana, A., & Minarso, D. (2020). Modal sosial dan kemiskinan di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 317–338. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3303>
- Kornitasari, Y., Manzilati, A., & Efani, A. (2019). PRINCIPAL AGENT DALAM INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP; KONTRAK YANG MENGUATKAN ATAU MELEMAHKAN? (STUDI KASUS PERIKANAN TANGKAP DI PESISIR MALANG SELATAN). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.7396>
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN KEBERLANJUTANNYA. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2). <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>
- Kusmiati, E., _ H., & Malinda, S. (2018). KEGIATAN STUDI PENGUATAN LEMBAGA KOPERASI PADA MASYARAKAT PETANI GARAM DI KAWASAN PESISIR PANTAI. *Charity*, 1(1). <https://doi.org/10.25124/charity.v1i01.1585>
- Liu, Y., Amin, A., Rasool, S. F., & Zaman, Q. U. (2020). The role of agriculture and foreign remittances in mitigating rural poverty: Empirical evidence from Pakistan. *Risk Management and Healthcare Policy*, 13. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S235580>
- Lulun, F. N., Sahusilawane, A. M., & Siwalette, J. D. (2019). PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI DI DESA WAIHERU KECAMATAN BAGUALA KOTA AMBON. *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 7(2). <https://doi.org/10.30598/agrilan.v7i2.889>
- Masripah, S., & Yuliansyah, S. (2018). Sistem Informasi Pencatatan Simpan Pinjam Pada Koperasi. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 14(1).
- Monang, S. Tambun, J., & Bangun, R. (2018). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1574>
- Nawaz, R., Iftikhar, M., Khan, G. A., & Akhtar, S. (2022). Food Security and Vivacious Circle of Poverty Among Rural Households in Pakistan. *Journal of South Asian Studies*, 10(3). <https://doi.org/10.33687/jsas.010.03.4437>
- Pang, J., Jiao, F., & Zhang, Y. (2022). An Analysis of the Impact of the Digital Economy on High-Quality Economic Development in China—A Study Based on the Effects of Supply and Demand. *Sustainability (Switzerland)*, 14(24). <https://doi.org/10.3390/su142416991>
- Prasetyo, K. C. (2019). Mencegah Tragedy of The Commons • Di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Governance Innovation*. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.294>
- Rakhmanda, A., . S., & Supardi Djasmani, S. (2018). Role of Fisher Group in The

- Fisheries Development in Sadeng Coast Gunungkidul Regency. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23225>
- Ridwan, M., & In'am, A. (2021). Social Capital Deviation in Capital Assistance System: Socio-Economic Studies of Coastal Communities. *Economies*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/economies9040204>
- Saleh, L. (2020). ANALISIS PEMASARAN PADI SAWAH DI KECAMATAN WAWOTOBI KABUPATEN KONAWE. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 4(2). <https://doi.org/10.36355/jas.v4i2.425>
- Setyawati, L. R., Avhanti, A. S., & Novarianti, A. D. (2021). Analisa Faktor Pendukung Vicious Circle of Poverty di Masyarakat Nelayan. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.58>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). *SMERU Working Paper*, April(April).
- Susilawati, S. (2019). Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1). <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.152>
- Vince, J., & Hardesty, B. D. (2018). Governance solutions to the tragedy of the commons that marine plastics have become. In *Frontiers in Marine Science* (Vol. 5, Issue JUN). <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00214>
- Wang, H., Zhao, Q., Bai, Y., Zhang, L., & Yu, X. (2020). Poverty and Subjective Poverty in Rural China. *Social Indicators Research*, 150(1). <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02303-0>
- Wijaya, A. B., & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, 2(2). <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.259>